



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Walikota Parepare Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2020.
5. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Penjabaran APBD adalah Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2020.

BAB II
APBD

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri atas ;

| | |
|--|------------------------------|
| a. Pendapatan Daerah | |
| 1. pendapatan asli daerah | Rp165.912.950.480,00 |
| 2. dana perimbangan | Rp623.353.553.000,00 |
| 3. lain-lain pendapatan yang sah | <u>Rp111.696.843.568,00</u> |
| Jumlah Pendapatan | Rp900.963.347.048,00 |
| b. Belanja Daerah | |
| 1. Belanja Tidak Langsung | |
| 1. belanja pegawai | Rp330.543.626.177,00 |
| 2. belanja bunga | Rp2.500.000.000,00 |
| 3. belanja subsidi | Rp0,00 |
| 4. belanja hibah | Rp14.391.400.000,00 |
| 5. belanja bantuan sosial | Rp4.852.500.000,00 |
| 6. belanja bagi hasil | Rp0,00 |
| 7. belanja bantuan keuangan | Rp879.130.904,00 |
| 8. belanja tidak terduga | <u>Rp1.000.000.000,00</u> |
| | Rp354.166.657.081,00 |
| 2. Belanja Langsung | |
| 1. belanja pegawai | Rp27.134.717.700,00 |
| 2. belanja barang dan jasa | Rp368.584.526.552,00 |
| 3. belanja modal | <u>Rp163.061.445.715,00</u> |
| | Rp558.780.689.967,00 |
| Jumlah Belanja | Rp912.947.347.048,00 |
| Surplus/(Defesit) | <u>Rp(11.984.000.000,00)</u> |
| c. Pembiayaan Daerah | |
| 1. penerimaan | Rp20.000.000.000,00 |
| 2. pengeluaran | <u>Rp8.016.000.000,00</u> |
| Jumlah Pembiayaan Netto | <u>Rp11.984.000.000,00</u> |
| Sisa lebih pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan | <u>Rp0,00</u> |

Pasal

Pasal 3

- (1) Ringkasan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.
- (3) Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 31 Desember 2019
WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2019 NOMOR 43

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTAPAREPARE

NOMOR 43 : TAHUN 2019

TANGGAL 31 DESEMBER 2019

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 4. | PENDAPATAN DAERAH | 900.963.347.048,00 |
| 4.1. | Pendapatan Asli Daerah | 165.912.950.480,00 |
| 4.1.1. | Pendapatan Pajak Daerah | 40.242.500.000,00 |
| 4.1.2. | Pendapatan Retribusi Daerah | 8.972.510.065,00 |
| 4.1.3. | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 7.694.535.351,00 |
| 4.1.4. | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 109.003.405.064,00 |
| 4.2. | Dana Perimbangan | 623.353.553.000,00 |
| 4.2.1. | Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 15.937.202.000,00 |
| 4.2.2. | Dana Alokasi Umum | 486.224.602.000,00 |
| 4.2.3. | Dana Alokasi Khusus | 121.191.749.000,00 |
| 4.3. | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 111.696.843.568,00 |
| 4.3.1. | Pendapatan Hibah | 27.237.840.000,00 |
| 4.3.3. | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya | 76.577.853.568,00 |
| 4.3.5. | Bantuan keuangan | 7.881.150.000,00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 900.963.347.048,00 |
| 5. | BELANJA DAERAH | 912.947.347.048,00 |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 354.166.657.081,00 |
| 5.1.1. | BELANJA PEGAWAI | 330.543.626.177,00 |
| 5.1.2. | BELANJA BUNGA | 2.500.000.000,00 |
| 5.1.4. | BELANJA HIBAH | 14.391.400.000,00 |
| 5.1.5. | BELANJA BANTUAN SOSIAL | 4.852.500.000,00 |
| 5.1.7. | BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN POLITIK | 879.130.904,00 |
| 5.1.8. | BELANJA TIDAK TERDUGA | 1.000.000.000,00 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 558.780.689.967,00 |
| 5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 27.134.717.700,00 |
| 5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 368.584.526.552,00 |
| 5.2.3. | BELANJA MODAL | 163.061.445.715,00 |
| | JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT) | 912.947.347.048,00 (11.984.000.000,00) |
| 6. | PEMBIAYAAN DAERAH | 11.984.000.000,00 |
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan Daerah | 20.000.000.000,00 |
| 6.1.1. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 20.000.000.000,00 |
| | JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 20.000.000.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|---------------|--|--------------------------|
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 8.016.000.000,00 |
| 6.2.2. | Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah | 5.250.000.000,00 |
| 6.2.3. | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri | 2.766.000.000,00 |
| 6.3 | JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 8.016.000.000,00 |
| | PEMBIAYAAN NETO | 11.984.000.000,00 |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN | 0 |
| | BERKENAAN (SILPA) | |

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
 NOMOR : 43 TAHUN 2019
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2019

PEMERINTAH KOTA PARE PARE
 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN
 ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Halaman : 1

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | DASAR HUKUM |
|----------------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01.1.01.01.00.00.4. | PENDAPATAN DAERAH | 32.000.000,00 | |
| 1.01.1.01.01.00.00.4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 32.000.000,00 | |
| 1.01.1.01.01.00.00.4.1.2. | PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH | 32.000.000,00 | Perda No 3 Tahun 2003 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 32.000.000,00 | |
| 1.01. 1.01.01.00.00.5. | BELANJA DAERAH | 210.704.263.975,00 | |
| 1.01.1.01.01.00.00.5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 159.203.832.475,00 | |
| 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1. | BELANJA PEGAWAI | 159.203.832.475,00 | |
| 1.01.1.01.01.00.00.5.2. | BELANJA LANGSUNG | 51.500.431.500,00 | |
| 1.01.1.01.01.01. | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 1.691.042.500,00 | |
| 1.01.1.01.01.01.001. | PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT | 120.000.000,00 | |
| 1.01.1.01.01.01.001.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 120.000.000,00 | |
| 1.01.1.01.01.01.002. | PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK | 230.000.000,00 | |
| 1.01.1.01.01.01.002.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 230.000.000,00 | |
| 1.01.1.01.01.01.006. | PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL | 25.000.000,00 | |
| 1.01.1.01.01.01.006.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 25.000.000,00 | |
| 1.01.1.01.01.01.007. | PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN | 340.102.500,00 | |
| 1.01.1.01.01.01.007.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 338.400.000,00 | |
| 1.01.1.01.01.01.007.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 1.702.500,00 | |
| 1.01.1.01.01.01.008. | PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR | 67.200.000,00 | |
| 1.01.1.01.01.01.008.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 67.200.000,00 | |
| 1.01.1.01.01.01.012. | PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR | 25.000.000,00 | |
| 1.01.1.01.01.01.012.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 25.000.000,00 | |
| 1.01.1.01.01.01.015. | PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 55.000.000,00 | |
| 1.01.1.01.01.01.015.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 55.000.000,00 | |
| 1.01.1.01.01.01.018. | RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH | 335.000.000,00 | |
| 1.01.1.01.01.01.018.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 335.000.000,00 | |
| 1.01.1.01.01.01.075. | PENYEDIAAN ADMINISTRASI KEGIATAN UPTD DINAS PENDIDIKAN | 150.000.000,00 | |
| 1.01.1.01.01.01.075.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 150.000.000,00 | |
| 1.01.1.01.01.01.080. | PENUNJANG KEGIATAN PENYELENGGARAAN PERKANTORAN | 286.240.000,00 | |
| 1.01.1.01.01.01.080.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 286.240.000,00 | |
| 1.01.1.01.01.01.093. | PENYEDIAAN JASA BPJS KETENAGAKERJAAN | 7.500.000,00 | |
| 1.01.1.01.01.01.093.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 7.500.000,00 | |
| 1.01.1.01.01.01.137. | PENYEDIAAN OPERASIONAL KANTOR SKB | 50.000.000,00 | |
| 1.01.1.01.01.01.137.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 50.000.000,00 | |
| 1.01.1.01.01.02. | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 869.700.000,00 | |
| 1.01.1.01.01.02.010. | PENGADAAN MEUBELAIR | 50.000.000,00 | |
| 1.01.1.01.01.02.010.5.2.3. | BELANJA MODAL | 50.000.000,00 | |
| 1.01.1.01.01.02.022. | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR | 75.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | DASAR HUKUM |
|----------------------------|--|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.02.5.02.01.26.06. | KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BARU,LEBIH TINGGI DARI KESERASIAN ANTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH | 30.000.000,00 | |
| 5.02.5.02.01.26.06.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 3.550.000,00 | |
| 5.02.5.02.01.26.06.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 26.450.000,00 | |
| 5.02.5.02.01.26.24. | PENYUSUNAN RISALAH PERSIDANGAN | 110.802.950,00 | |
| 5.02.5.02.01.26.24.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 400.000,00 | |
| 5.02.5.02.01.26.24.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 110.402.950,00 | |
| | JUMLAH BELANJA | 42.978.654.900,00 | |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (42.978.654.900,00) | |

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE